

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu keberlanjutan kini bukanlah hanya sekedar tren. Peningkatan kesadaran global terhadap keberlanjutan merubah paradigma dalam praktik bisnis dan menjadikannya sebagai bagian dari strategi bisnis. Untuk mencapai keberlanjutan, perusahaan dituntut untuk menerapkan transparansi serta memperhatikan konsep *Triple Bottom Line*, yaitu *Profit, People, and Planet* (Eko & Wuryan, 2021). Artinya, perusahaan yang dibangun dan didirikan dengan fokus tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan, seiring perkembangan zaman diwajibkan untuk memiliki tanggung jawab dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Peningkatan perhatian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan tercermin dalam regulasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di sektor yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Penetapan aturan ini menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan bukan hanya sekedar formalitas, melainkan bagian penting dari operasional perusahaan. Di tengah meningkatnya isu sosial dan lingkungan yang menjadi perhatian publik, perusahaan dituntut untuk bersikap lebih transparan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Salah satu bentuk dari transparansi tersebut adalah melalui penyusunan *sustainability report*. *Sustainability report* berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk

mengungkapkan kinerja dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dalam tiga aspek utama, yaitu *environmental, social, governance* (Eko & Wuryan, 2021). Dengan demikian, penyusunan *sustainability report* menjadi langkah penting bagi perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat citra positif di mata para pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, sektor energi merupakan salah satu industri yang menghadapi tantangan keberlanjutan paling besar di Indonesia. Sebagai kontributor utama emisi karbon, sektor ini menjadi perhatian karena ketergantungan aktivitasnya pada sumber daya alam fosil yang berdampak signifikan terhadap perubahan iklim. Dependensi terhadap energi fosil membuat sektor ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Berdasarkan laporan dari *Our World Data* (2025) yang mengacu pada data *Global Carbon Budget 2025* emisi CO₂ tahunan Indonesia yang bersumber dari bahan bakar fosil dan industri menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, emisi tercatat sebesar 632,95 juta ton CO₂, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 758,02 juta ton CO₂. Tren kenaikan ini terus berlanjut hingga mencapai 762,36 juta ton CO₂ pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 angka emisi tahunan melonjak signifikan mencapai 812,22 juta ton CO₂ atau sekitar 2,1% total dari total emisi karbon di dunia (*Our World in Data, 2025*). Ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara sebagai sumber energi primer menjadi pendorong utama di balik lonjakan angka emisi tersebut yang menciptakan dilema pemenuhan kebutuhan energi nasional dan tanggung jawab pelestarian

lingkungan. Salah satu fenomena nyata yang merepresentasikan tantangan dekarbonisasi di sektor ini adalah proyek smelter aluminium tahap 1 milik PT. Adaro Energy Group di Kalimantan Utara. Merujuk pada laporan *Institute for Energy Economics and Financial Analysis* penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) *captive* berkapasitas 1.100 MW yang menggunakan bahan bakar batu bara untuk mendukung proyek tersebut diperkirakan akan menghasilkan emisi sebesar 5,2 juta ton Co₂ per tahun. Jumlah emisi dari satu proyek ini setara dengan hampir 1% dari total emisi nasional Indonesia pada tahun 2021. Dalam skala yang lebih luas, keberadaan pembangkit listrik *captive* ini diperkirakan akan meningkatkan total kapasitas PLTU batu bara nasional sebesar 52% dari tahun 2023, serta memicu kenaikan konsumsi batu bara domestik hingga 17%, menunjukkan adanya ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi fosil dalam proses transisi industri di Indonesia (*Institute for Energy Economics and Financial Analysis*, 2023). Fakta ini menimbulkan isu mengenai efektivitas strategi dekarbonisasi yang dijalankan oleh perusahaan energi besar di Indonesia, serta menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan target *net-zero emission* tahun 2060 (*Internasional Energy Agency*, n.d.). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran perusahaan di sektor energi, memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, sebagai wujud akuntabilitas atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan sektor energi

termasuk di dalam kategori perusahaan publik yang memiliki kewajiban serupa dan dituntut untuk melakukan transparansi atas aktivitas bisnis operasionalnya.

Pengungkapan *sustainability report* dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *corporate governance* yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas serta tingkat keterbukaan informasi perusahaan. Penerapan *corporate governance* menjadi aspek krusial karena berfungsi sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap sejalan dengan tujuan dan kepentingan para pemangku kepentingan (Ismail, 2009). Struktur tata kelola yang baik berlandaskan pada prinsip utama seperti *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness* (Sony et al., 2009). Penerapan prinsip tersebut tidak hanya mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang. Di dalam penelitian ini, proksi *corporate governance* yang digunakan peneliti meliputi dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam proses pengawasan, pengendalian, serta pengambilan keputusan strategis di perusahaan.

Variabel pertama dewan komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara objektif. Melalui independensi yang dimiliki, keberadaan dewan komisaris independen diharapkan mampu mendorong transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi non-keuangan, termasuk pertanggungjawaban lingkungan dan sosial melalui *sustainability report*.

Variabel kedua dewan direksi bertugas memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan visi jangka panjang, termasuk dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keahlian dan pengalaman yang dimiliki, dewan direksi berperan penting dalam meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik, di mana semakin efektif pengelolaan yang dilakukan, maka akan semakin transparan pula pengungkapan informasi keberlanjutan yang disajikan oleh perusahaan.

Variabel ketiga selain peran dewan, komite audit memiliki kedudukan strategis sebagai organ pendukung yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris dalam memperkuat fungsi pengawasan. Komite ini berperan penting dalam memastikan integritas proses pelaporan perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan, melalui pengawasan audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit yang efektif mampu menciptakan sistem kendali yang lebih kuat, sehingga mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi sosial dan lingkungan secara lebih transparan dan akuntabel guna memitigasi risiko serta meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Selain itu, profitabilitas juga termasuk faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menerapkan praktik *corporate governance* yang baik serta melaksanakan tanggung jawab secara lebih optimal. Profitabilitas yang baik juga mencerminkan kinerja keuangan yang stabil, sehingga perusahaan menjaga reputasi dan meningkatkan transparansi kepada para pemangku

kepentingan. Oleh karena itu, profitabilitas digunakan sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan *sustainability report*.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *sustainability report*. Hasil penelitian Sari et al. (2021) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap *sustainability report*. Namun temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Listiani & Fadjar (2025) yang menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*. Pengaruh dewan direksi yang diteliti Saraswati et al. (2024) dan Handayani et al. (2024), menyatakan dewan direksi berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Namun tidak sejalan dengan penelitian Hendrati et al. (2023) dan Idawati et al. (2024) menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian Handayani et al. (2024) yang menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Namun tidak sejalan dengan penelitian Idawati et al. (2024) dan Listiani & Fadjar (2025) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Hal ini mengindikasikan keberadaan komite audit secara jumlah belum efektif karena fokus mereka masih pada aspek keuangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pemaparan latar belakang, serta hasil penelitian terdahulu, peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian ulang terhadap variabel independen yang telah diterapkan dalam penelitian sebelumnya, yaitu dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Berdasarkan

Pasal 3 Ayat (1) huruf b POJK No. 51/POJK.03/2017, penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan bagi emiten dan perusahaan publik secara resmi berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Maka dari itu, dalam penelitian ini, periode yang digunakan tahun 2021-2025 sebagai titik awal perusahaan melewati fase transisi dan stabilitas dalam pelaporan laporan keberlanjutan, dan konsisten terhadap instrumen pengukuran peneliti yang menggunakan GRI Standard 2021 yang secara resmi diberlakukan pada oktober 2021 serta agar selaras dengan kondisi terkini dan relevan. Kebaruan penelitian juga ditunjukkan melalui penambahan profitabilitas sebagai variabel moderasi yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu. Dengan mempertimbangkan fenomena dan permasalahan yang ada, perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan *sustainability report*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan antara lain:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

4. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh hubungan *corporate governance* terhadap *sustainability report*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *sustainability report* dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang akuntansi, serta menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis, khususnya dalam memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara *corporate governance* dan kualitas pengungkapan *sustainability report*.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi evaluatif bagi perusahaan dalam menilai implikasi dari aktivitas operasionalnya, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan intensitas pengungkapan *sustainability report*.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi variabel dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan analisis data dan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian.